

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan telah dilakukan dengan menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Semakin besar nilai aset semakin tinggi juga kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- b. PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Semakin besar nilai aset semakin tinggi juga kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- c. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adanya peningkatan maupun penurunan nilai *leverage* tidak mempengaruhi kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- d. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adanya peningkatan maupun penurunan jumlah transfer dana perimbangan dari komponen DAU tidak mempengaruhi kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- e. Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adanya peningkatan maupun penurunan jumlah transfer dana perimbangan dari komponen DAK tidak mempengaruhi kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- f. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Semakin besar jumlah transfer dana perimbangan dari komponen DBH, semakin rendah kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasar kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tata kelola aset untuk terus ditingkatkan sesuai kaidah peraturan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal itu dalam rangka mendorong pendapatan daerah sekaligus juga menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan aset daerah secara bijak. Upaya ini diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lebih tinggi lagi.
- b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berusaha terus meningkatkan PDRB Perkapita, sehingga tingkat PDRB Perkapita yang sudah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah akan semakin menambah kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mengevaluasi terkait kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum pada kebutuhan operasional/rutin agar program kegiatan yang bersumber dari dana ini benar-benar untuk kebutuhan dasar sesuai standar analisis biaya. Dengan demikian pengelolaan DAU diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.
- d. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah diharapkan melakukan komunikasi lebih intensif ke pemerintah pusat melalui kementerian yang berkompetensi dalam penyusunan petunjuk teknis maupun pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, sehingga program pemerintah kabupaten/kota dapat lebih bersinergi dengan pemerintah pusat. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- e. Adanya pengaruh negatif dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah membawa konsekuensi bagi pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi pola kebijakan dalam pengelolaannya. Misalnya dengan penyebaran alokasi DBH ke lebih

banyak organisasi perangkat daerah yang dilibatkan dalam pengalokasian program dan kegiatan secara proporsional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan DBH sekaligus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

- f. Penelitian selanjutnya perlu untuk menambah atau mengganti variabel-variabel yang relevan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah seperti pendapatan daerah lainnya, opini auditor dan tingkat investasi. Demikian juga untuk metode pengukuran kinerja keuangan bisa menggunakan metode lain seperti rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, ataupun rasio pertumbuhan.

